



**BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Buton adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015.

#### Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015 sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017.

## Pasal 3





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 2 MARET 2015

**BUPATI BUTON,**



PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	
KASAG. HUKUM	

**SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN**

Lampiran : Peraturan Bupati Buton  
 Nomor : 4 Tahun 2015  
 Tanggal : 2 Maret 2015  
 Tentang : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2015.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	Pendidikan Anak Usia Dini (%)	70,45	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SD/MI/paket A (%)	100	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SD/MI (%)	100	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SD (%)	98,21	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/paket A (%)	99,84	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	23	Dinas Pendidikan
	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	94,96	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/paket B (%)	99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMP (%)	94,85	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%)	100	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/paket B (%)	98,97	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS (%)	56	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/paket C (%)	99	Dinas Pendidikan
	Angka pendidikan yang ditamatkan (APT) SMA (%)	82,06	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah SMA/MA/SMK (%)	99	Dinas Pendidikan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA / SMK / MA / paket C (%)	98,97	Dinas Pendidikan
	Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	96	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,39	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	76,6	Dinas Pendidikan
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	83,31	Dinas Pendidikan
	Angka melek huruf (%)	94,85	Dinas Pendidikan
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	55,91	Dinas Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah (%)	7,10	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AK) SD/MI*	99,82	Dinas Pendidikan
	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs*	96,05	Dinas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pemuda dan olah raga	Rasio jumlah lapangan olahraga per kecamatan*	13,00	Dinas Pendidikan
	Jumlah organisasi kepemudaan*	43	Dinas Pendidikan
	Jumlah kegiatan Kepemudaan*	65	Dinas Pendidikan
Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	19.386	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio tempat ibadah (Mesjid)	1,21	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Gereja)	0,02	Sekretariat Daerah
	Rasio tempat ibadah (Pura)	0,02	Sekretariat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1000 KH)	977,00	Dinas Kesehatan
	Angka usia harapan hidup (Thn)	72	Dinas Kesehatan
	Menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita (%)	<15	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian bayi (AKB/1.000 KH)	23	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI/100.000 KH)	102	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian neonatal per 1.000 KH	20	Dinas Kesehatan
	Menurunnya angka kematian balita (AKABA/1.000 KH)	20	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (ICU) (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Diare (%)	90	Dinas Kesehatan
	Annual Parasite Incidence (API) Per 1.000 Penduduk	< 1,0	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas(%)	67	Dinas Kesehatan
	Angka penggunaan tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)(%)*	45	RSUD
	Angka rata-rata lama perawatan atau length of stay (LOS)(Hari)*	5,5	RSUD

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	Angka selang waktu antara penggunaan tempat tidur atau Turn over internal (TOI)(Hari)*	7	RSUD
	Frekuensi pemakaian tempat tidur atau bed turn over internal (BTO) (berapa kali)*	28	RSUD
	Angka kematian netto (Net death rate/ NDR) (%)*	1	RSUD
	Angka kematian umum gross death rate (GDR) (%)*	1	RSUD
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat (Menit)*	≤ 10	RSUD
	Kematian pasien di UGD(kurang atau sama dengan 8 jam)(per 1000)*	≤ 2	RSUD
Menurunnya jumlah masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	62,0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase PMKS skala Kab/Kota yang menerima Program Pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	60	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	78	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah anak terlantar yang dibina (Orang)	70	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap (%)	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase konflik sosial yang ditangani (%)	75	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	47	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	43	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	95	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek aktif (%)	51	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Transmigran swakarsa (%)	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase transmigrasi umum yang berhasil (%)	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan dan kesetaraan gender	Jumlah Ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha pertahun (Orang)	241.148	BKKBD dan PP
	Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan	1	BKKBD dan PP
	Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun (Kasus)	0	BKKBD dan PP
	Jumlah perkawinan dengan istri dibawah 16 tahun per tahun (Orang)	1.358	BKKBD dan PP
	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda (Orang)	195	BKKBD dan PP
	Persentase Camat Perempuan (%)	0	BKKBD dan PP
	Persentase perempuan sebagai pengurus partai politik / anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kab. Buton (Orang)	3	BKKBD dan PP
	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah (Orang)	2.887	BKKBD dan PP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas hidup anak	Jumlah kegiatan pemasyarakatan hak anak per tahun	5	BKKBD dan PP
	Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun (Kasus)	0	BKKBD dan PP
	Jumlah persentase anak (<1 tahun) diimunisasi per tahun (%)	100	BKKBD dan PP
Meningkatnya SDM melalui pengaturan kelahiran dengan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	Prevalensi peserta KB aktif (%)	73	BKKBD dan PP
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Jumlah)	48,956	BKKBD dan PP
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jalan kota dalam kondisi baik (%)	57,38	Dinas Pekerjaan Umum
	Jembatan dalam kondisi baik (M')	800	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang jalan kota/jumlah penduduk (%)	28	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan Air (minimal 1,5 M) (%)	3,8	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	66,40	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
Meningkatnya pemenuhan data dan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan	Tersedianya Perda RT/RW	0	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen RDTR (Dok)	0	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Tersedianya dokumen RTBL (Dok)	0	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,05	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD (ada/tdk)	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD (ada/tdk)	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD (ada/tdk)	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD (ada/tdk)	90	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Jumlah dokumen hasil litbang bidang pemerintahan, politik, ekososbud, keu dan SDA (Dok)	9	Badan Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya sarana prasarana pertanian	Rasio panjang irigasi dalam kondisi baik (%)	0,50	Dinas Pekerjaan Umum
	Luas irigasi dalam kondisi baik (%)	55,7	Dinas Pekerjaan Umum
Meningkatnya sarana dan prasarana pemukiman dan perumahan	Cakupan pelayanan irigasi yang teraliri sawah (Ha)	1.678	Dinas Pekerjaan Umum
	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	70	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	75,3	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase rumah layak huni (%)	90	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase rumah tangga/keluarga berumah tidak layak huni (%)	10	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase rumah tangga mendapat aliran listrik (%)	60	Dinas Pertambangan
Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan	Persentase kendaraan wajib uji lulus Uji Kendaraan (%)	100	Dinas Perhubungan
	Jumlah uji KIR Angkutan Umum (Jumlah Angkutan Umum)	2360,00	Dinas Perhubungan
	Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan (%) :		Dinas Perhubungan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	- Quarail	79,69	Dinas Perhubungan
	- Rambu perintah Tabel IIB	70	Dinas Perhubungan
	- Rambu peringatan Tabel 1	84	Dinas Perhubungan
	- Rambu larangan Tabel IIA	60	Dinas Perhubungan
	- Rambu petunjuk Tabel III	72	Dinas Perhubungan
	- Deliniator	60	Dinas Perhubungan
	Persentase pemenuhan kebutuhan terminal Type B yang representatif (Jumlah Terminal)	1	Dinas Perhubungan
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (Jumlah Pelabuhan Laut)	68	Dinas Perhubungan
	Rasio ijin trayek (Jumlah Izin Trayek )	1.182	Dinas Perhubungan
Meningkatnya pemanfaatan ruang yang baik	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB (%)	30	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase ruang terbuka hijau yang fungsional (%)	30	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Persentase ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan perkotaan (%)	32,28	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan penanganan persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	45	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman
	Tempat pembuangan sampah (TPS) / 1000 penduduk	250	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana	Persentase ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran (%)	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana kebakaran (%)	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bencana alam (%)	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya pengelolaan potensi SDA secara lestari	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) (%)	18	Dinas Kehutanan
	Kerusakan kawasan hutan (Ha) (%)	0,013	Dinas Kehutanan
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	386.552	Dinas Kehutanan
	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	Badan Pengelola Lingkungan Hidup
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Kelautan dan Perikanan	Konsumsi ikan (%)	79,80	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	3,1	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	376,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi aktif (%)	96	Dinas Koperasi dan UKM
	Usaha mikro dan kecil (%)	100	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase peningkatan SHU (%)	30	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Peningkatan UMKM (%)	15	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase UMKM yang dibina (%)	30	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase UMKM non BPR/LKM UKM (%)	240	Dinas Koperasi dan UKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya produksi dan produktifitas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Produtivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	38,28	Dinas Pertanian
	Produksi Peternakan ( Ekor/Thn)	76	BP4K2P
	Produksi daging ternak (Kg)	343.633	Dinas Pertanian
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	22,87	Dinas Pertanian
	Regulasi Ketahanan Pangan (ada/tdk)	ada	BP4K2P
	Ketersediaan pangan utama (Ton)	453,42	BP4K2P
Meningkatnya Pengelolaan Potensi Mineral dan Air	Pertambangan tanpa ijin (Ha)	33	Dinas Pertambangan dan Energi
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	12,5	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif	Rasio desa berlistrik (%)	81	Dinas Pertambangan dan Energi
	Rasio elektrifikasi (%)	77	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya industri perdagangan usaha industri kreatif	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan (%)	18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase IKM produktif (%)	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Persentase jumlah IKM yang dibina (%)	20,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (Rp)*	110.500,08	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Rp)*	315,530,27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya jumlah investasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Lama Proses Perizinan	2	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Persentase jumlah izin usaha yang diterbitkan (%)	100	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	8	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMA/ PMDN (milyar rupiah)	5 M	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Nilai Investasi PMA (milyar rupiah)	0	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
	Nilai Investasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap
Meningkatnya Keparwisataaan Daerah	Kunjungan wisatawan (Jumlah)	600	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase promosi budaya Untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik (%)	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase sarana pada obyek wisata*	0,6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%)	30,91	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Berapa Kali )	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan	243	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih*	46	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase LPM berprestasi (%)	5	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase PKK aktif (%)	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Meningkatnya poleksosbud kamtibmas perlindungan serta kedisiplinan masyarakat	Rasio bangunan Ber-IMB (%)	6,63	Dinas Tata Ruang dan Perumahan Rakyat
	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Persentase pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa (per tahun)	34/34	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Angka kriminalitas (%)*	87	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk	60	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan (%)	3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)*	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu/ pilkada (%)	80,12	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
	Jumlah orang asing yang terpantau*	2404	Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik
Terwujudnya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik serta meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan (%)	13,00	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan bidang tugasnya (kompetensinya) (%)	3,43	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
	Persentase pegawai sesuai kompetensi jabatan (%)	100	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	39,04	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah (%)	45,9	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio efisiensi belanja (%)	10	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Meningkatnya PAD	23.176.883.617	Dinas Pendapatan Daerah
	Peningkatan proporsi PAD dibandingkan Total Pendapatan (%)	110	Dinas Pendapatan Daerah



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya pelayanan pemerintahan daerah	Luas lahan bersertifikat (%)	81	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	Sekretariat Daerah
	Kepemilikan KTP (%)	77	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga (%)	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kepemilikan akte kelahiran(%)	29	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase SKPD yang memiliki SPM (%)*	69	Sekretariat Daerah
	Persentase SKPD yang memiliki SOP sesuai tupoksi (%)*	69	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pemenuhan Produk Hukum Daerah secara sistematis dan terencana sesuai kebutuhan daerah	Persentase Raperda yang menjadi Perda (%)	68	Sekretariat DPRD
	Persentase Peraturan Bupati yang diterbitkan (%)	68	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan SK Bupati (%)	61	Sekretariat Daerah
	Persentase Penerbitan Instruksi Bupati (%)*	50	Sekretariat Daerah
	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan dibanding Perda yang diajukan (%)*	54	Sekretariat Daerah
	Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum (Jumlah Kasus)	22	Sekretariat Daerah
Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK dan APIP (%)	80/95	Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas data dan informasi	Rasio SKPD yang akses ke jaringan internet (%)	22,22	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Rasio kecamatan yang akses ke jaringan internet (%)	19,05	Badan Kominfo, PDE, Arsip dan Perpustakaan
	Website milik pemerintah daerah (%)	69	Sekretariat Daerah
	Jumlah pameran/expo	6	Sekretariat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SKPD PANAGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya perencanaan pembangunan partisipatif	Persentase aparat Bappeda yang mengikuti pelatihan perencanaan (%)	55	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN